

**ANALISIS KESIAPSIAGAAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP POTENSI
DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DI WILAYAH KPH SEMARANG
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
(Studi Kasus di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Penggaron)**

Imam Subha Ari Pamungkas, Ida Wahyuni, Suroto
Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
Email : imamsubha88@gmail.com

ABSTRACT

Forests are part of an ecosystem that is essential to the balance of nature. Forest fire is circumstances where the forest is engulfed in flames causing damage to forests and forest products that cause harm of economic and environmental value. Based on data from KPH Semarang forest fires report on June - October 2015, the BKPH Penggaron forest area had experienced five forest fires. Forestry police's role of the forest fire potential and prevention is extremely important to conserve forests. The objective of this study was to determine the behavior of forestry police preparedness to forest fire potential and prevention in KPH Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. This study was a descriptive qualitative study with indepth interview. The subjects of this research were 4 people as key informants and 3 people as a triangulation informants. The result of this study showed the key informants already known the definition of forest fire, the caused of forest fire, the impact of forest fire, and tools which beneficial to forest fire protection. Attitude of key informants already prepared to faced forest fire and already did forest fire prevention. Availability of forest fire prevention tools in the workplace was still lacking Availability of forest fire prevention and protection training could support the forestry police duties to forest fire prevention and protection. Support of LMDH, Head of HRD department, Asper, and Security coordinator was extremely important to forest fire prevention and protection. Researcher advicing the company to conduct a risk assessment of forest fires and to consider the provision of sufficient fire-fighting facilities.

Keyword : preparedness, forest fire, forestry police

A. LATAR BELAKANG

Hutan merupakan bagian dari ekosistem yang sangat penting untuk keseimbangan alam. Hutan juga merupakan tempat berlindung bagi berbagai spesies flora dan fauna sekaligus sumber daya alam bagi manusia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire, yaitu seluas 129 juta hektar.

Kawasan hutan tersebut terbagi ke dalam hutan konservasi seluas 27 juta hektar, hutan lindung 30 juta hektar dan sisanya hutan produksi.⁽¹⁾ Hal ini berarti lebih dari setengah wilayah dataran Indonesia merupakan hutan.

Di lain pihak, hutan telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup tinggi. Data Greenpeace mencatat, dalam kurun waktu hingga 7 September 2015

saja, titik api yang ada sebanyak 8.540 dan tersebar paling banyak di pesisir timur Sumatera serta Kalimantan. Data Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa hingga tahun 2006 tingkat deforestasi diperkirakan 1,9 juta ha/tahun.^(2,3)

Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana api melahap bahan bakar bervegetasi, yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non-hutan. Kebakaran hutan di Indonesia seringkali membakar areal hutan dan areal nonhutan, atau sebaliknya.^(4,5)

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁽⁶⁾

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu fungsi dari polisi kehutanan adalah mencegah dan

memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.⁽⁷⁾

Perum Perhutani KPH Semarang merupakan salah satu KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yang ada di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dengan 9 wilayah pengelolaan BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) dan 35 RPH (Resort Pemangkuan Hutan).

Salah satu BKPH di KPH Semarang yang memiliki potensi kebakaran hutan yang cukup tinggi adalah BKPH Penggaron. Sebagai kawasan wisata, wilayah hutan Penggaron menjadi kawasan hutan yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Tak jarang wisatawan melakukan tindakan yang tidak aman, misalnya membuang puntung rokok sembarangan atau pun membiarkan api unggun tetap menyala.

Berdasarkan data laporan kejadian kebakaran hutan KPH Semarang bulan Juni-Oktober 2015, wilayah hutan BKPH Penggaron telah mengalami lima kejadian kebakaran hutan. Pada bulan Agustus 2015 terjadi dua kali kejadian kebakaran hutan di kawasan RPH Gedawang (24 Agustus 2015) dan RPH Susukan (25 Agustus 2015). Pada bulan Oktober 2015 terjadi dua kali kejadian kebakaran hutan di kawasan RPH Susukan (19, 25, dan 27 Oktober 2015).

Peran polisi kehutanan terhadap potensi dan pencegahan hutan sangatlah penting untuk menjaga kelestarian hutan dan menghindarkan hutan dari kebakaran. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti kesiapsiagaan polisi kehutanan terhadap potensi dan pencegahan kebakaran hutan di

wilayah KPH Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan utama pada penelitian ini adalah seluruh mandor polter dan mantri/ KRPH di wilayah kerja BKPH Penggaron KPH Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang berjumlah 4 orang. Mandor polter dan Mantri/ KRPH dipilih sebagai informan utama karena merupakan polisi kehutanan yang bertanggungjawab terhadap kawasan teritorial hutan yang menjadi wilayahnya. Informan triangulasi dalam penelitian ini adalah kepala urusan SDM, Asper/ KBKPH, dan Koordinator Keamanan/ Wakil Administratur KPH Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi ini dilakukan dengan mengamati ketersediaan fasilitas serta hasil kegiatan pencegahan kebakaran yang dilakukan di BKPH Penggaron KPH Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap responden. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Penggaron merupakan salah satu BKPH yang ada di KPH Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. BKPH Penggaron terdiri dari 2 RPH (Resort Pemangkuan Hutan), yaitu RPH Gedawang seluas 1204,30 Ha dan RPH Susukan seluas 758,38 Ha. Kawasan hutan di BKPH Penggaron merupakan hutan fungsi lindung. Jenis pohon yang ada di kawasan BKPH Penggaron beraneka ragam, yaitu: jati, mindi, pinus, sengon, mahoni, dan rimba campur lainnya.

Di wilayah BKPH Penggaron terdapat delapan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yaitu LMDH Wono Tani Mulyo, LMDH Cemoro Sewu, LMDH Trubus Makmur, dan LMDH Lestari Makmur yang terdapat di RPH Susukan serta LMDH Rukun Makmur, LMDH Jati Sejahtera, LMDH Gedawang Makmur, dan LMDH Sigeblok Asri yang terdapat di RPH Gedawang.

2. Karakteristik Informan

Informan utama pada penelitian ini adalah polisi kehutanan yang menetap dan berada di wilayah teritorialnya, yaitu terdiri dari 2 mantri (Ketua RPH Gedawang dan RPH Susukan) dan 2 mandor polter (polisi hutan teritorial).

Penelitian ini mengambil informan utama yaitu 4 orang laki-laki. Usia keempat informan utama tersebut secara berurutan adalah 48 tahun, 43 tahun, 52 tahun, dan 52 tahun. Semua informan utama diketahui berlatarbelakang pendidikan terakhir SMA.

Dalam penelitian ini diambil 3 orang sebagai informan triangulasi yaitu Asper (Asisten Perhutani/Ketua BKPH), Kepala Urusan SDM, dan Koordinator Keamanan. Dua orang informan triangulasi berjenis kelamin laki-laki dan satu orang berjenis kelamin perempuan dengan usia 46 tahun, 47 tahun, dan 50 tahun. Dua informan triangulasi memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu sarjana/ S1 dan satu informan triangulasi memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu SMA.

3. Hasil Observasi

Berdasarkan kegiatan observasi yang dilakukan di BKPH Penggaron mengenai ketersediaan peralatan penanggulangan kebakaran, didapatkan bahwa di BKPH Penggaron terdapat peralatan penanggulangan yang masih tradisional yaitu menggunakan golok tebas untuk membuat *gebyok* dari tanaman, cangkul, dan garu. Fasilitas penanggulangan kebakaran dapat memudahkan tugas polisi kehutanan dalam memadamkan api. Fasilitas penanggulangan kebakaran yang seharusnya disediakan adalah pompa punggung,

gergaji mesin, pompa air, kapak dua fungsi, kapak dua mata, pengait rumput dan semak, golok tebas, gergaji, garu tajam, sekop api, cangkul, dan kepyok api.

Tindakan

pencegahan kebakaran di BKPH Penggaron telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu dibuktikan dengan adanya jadwal kegiatan patroli hutan, data inventaris lokasi rawan kebakaran, sekat bakar, regu satuan petugas pemadam kebakaran hutan dengan melibatkan masyarakat, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan adanya plang/ sosialisasi tentang kebakaran hutan.

4. Analisis Tingkat Pengetahuan Polisi Kehutanan tentang Kebakaran

Pengetahuan

informan utama tentang pengertian kebakaran hutan tergolong cukup baik. Informan utama mendefinisikan kebakaran hutan sebagai peristiwa kerusakan hutan akibat ulah manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang didukung dengan kondisi alam dan cuaca. Apabila pengetahuan manusia akan bahaya, kerentanan, risiko dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko cukup memadai maka akan dapat menciptakan aksi masyarakat yang efektif dalam menghadapi bencana.⁽⁸⁾

5. Analisis Sikap Polisi Kehutanan terhadap Kebakaran

Peneliti menganalisis bahwa sikap yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap kebakaran hutan sudah cukup baik. Informan utama memiliki sikap yang tanggap ketika terjadi kebakaran hutan. Ketika memperoleh informasi bahwa terjadi kebakaran hutan, informan utama melakukan koordinasi antar masing-masing personil serta meminta bantuan warga untuk bersama-sama menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Hal ini sesuai dengan penelitian LIPI pada tahun 2006 bahwa pengaruh paling besar dalam perhitungan tingkat kesiapsiagaan masyarakat perdesaan Aceh adalah tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat.⁽⁹⁾

6. Analisis Faktor Ketersediaan Fasilitas Penanggulangan Kebakaran

Tempat kerja belum memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Informan utama berpendapat bahwa terdapat beberapa fasilitas yang tersedia di tempat kerja yang dapat menunjang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, yaitu *gepyok*, golok tebas, sapu, dan garu. Ketersediaan fasilitas penanggulangan kebakaran sangat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan polisi kehutanan terhadap potensi dan pencegahan kebakaran hutan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ryan pada tahun 2015 bahwa ada hubungan yang

signifikan antara fasilitas dengan kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran di lingkungan pemukiman yang sangat berguna untuk penanggulangan jika terjadi kondisi darurat.⁽¹⁰⁾

7. Analisis Faktor Ketersediaan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran

Setiap informan utama telah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran. Materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana cara memadamkan api, menjaga keamanan hutan, dan simulasi pemadaman api di wilayah hutan. Ketersediaan pelatihan penanggulangan kebakaran sangat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan polisi kehutanan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Eko pada tahun 1970 yang mengatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan antara karyawan yang mendapatkan pelatihan dengan karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan, dan ada perbedaan sikap antara karyawan yang mendapatkan pelatihan dengan karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan.⁽¹¹⁾

8. Analisis Faktor Dukungan LMDH Setempat

Informan utama berpendapat bahwa LMDH ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Dalam struktur organisasi Satdalkar, anggota LMDH dimasukkan

dalam struktur organisasi. Dukungan LMDH setempat sangat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan polisi kehutan terhadap potensi dan pencegahan kebakaran hutan. Hal ini sesuai dengan penelitian Fatmah pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa masyarakat memerlukan dorongan yang kuat dalam menghadapi bahaya kebakaran dengan pemberian informasi dampak bahaya kebakaran yang dilanjutkan dengan sosialisasi berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pelatihan.⁽¹²⁾

9. Analisis Faktor Dukungan Kepala Urusan SDM

Dukungan yang diberikan Kepala Urusan SDM adalah berkaitan dengan hal kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan koordinasi dengan bidang keamanan. Dukungan Kepala Urusan SDM sebagai salah satu *stakeholder* yang mengurus sumber daya manusia di KPH Semarang sangat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan polisi kehutan terhadap potensi dan pencegahan kebakaran hutan.

10. Analisis Faktor Dukungan Asper/KBKPH

Dukungan yang diberikan Asper berupa koordinasi dan pemberian instruksi yang jelas serta ikut turun langsung ke lapangan. Dukungan Asper/ KBKPH sebagai pemimpin tertinggi kelembagaan di BKPH Pengaron sangat

berpengaruh terhadap kesiapsiagaan polisi kehutan terhadap potensi dan pencegahan kebakaran hutan. Hal ini sesuai dengan penelitian Akbar pada tahun 2008 bahwa ada hubungan kebakaran dengan aspek kelembagaan dimana kelembagaan pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat telah cukup berperan dalam menekan penyebaran kebakaran hutan dan lahan.⁽¹³⁾

11. Analisis Faktor Dukungan Koordinator Keamanan

Dukungan yang dilakukan koordinator keamanan adalah dalam bentuk pemberian saran, pembinaan, dan pengarahan tentang keamanan dan kelestarian hutan. Pengawasan yang dilakukan oleh Koordinator Keamanan adalah dengan mengevaluasi kegiatan harian dan kinerja melalui buku saku. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Koordinator Keamanan juga berupa tes kesamaptan untuk menilai kondisi fisik para polisi kehutan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Polisi kehutan sudah mengetahui apa itu kebakaran hutan, penyebab kebakaran hutan, dampak kebakaran hutan, dan alat-alat apa saja yang dapat digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan.
- Polisi kehutan memiliki sikap yang

- tanggap ketika terjadi kebakaran hutan, serta sikap dalam pencegahan kebakaran hutan dilakukan dengan melihat kawasan rawan kebakaran hutan, sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patroli rutin, pembutanan *ilaran/* sekat bakar, serta pemasangan plang bahaya kebakaran hutan di lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan.
- c. Ketersediaan fasilitas di tempat kerja seperti *gepyok*, golok tebas, sapu, dan garu dapat menunjang tugas polisi kehutanan. Fasilitas tersebut bersifat berkelanjutan dan akan dilengkapi untuk kedepannya.
 - d. Ketersediaan pelatihan dan pembinaan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja sangat bermanfaat bagi polisi kehutanan karena memberikan bekal pengalaman untuk kinerja polisi kehutanan.
 - e. Dukungan LMDH sangat diperlukan oleh polisi kehutanan sebagai mitra kerja menjada keamanan dan kelestarian hutan.
 - f. Dukungan Kepala Urusan SDM bagi polisi kehutanan adalah berupa dukungan yang bersifat kepegawaian, misalnya gaji, tunjangan, restitusi pengobatan, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja.
 - g. Dukungan Asper bagi polisi kehutanan adalah berupa koordinasi, monitoring dan evaluasi yang baik serta mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
 - h. Dukungan Koordinator Keamanan bagi polisi kehutanan adalah sebagai pusat komando dan penyediaan pelatihan, pembinaan, serta tes kesamaptaan.
- ## 2. Saran
- a. Polisi kehutanan hendaknya melakukan koordinasi kepada LMDH sebagai mitra Perhutani agar dapat dilakukan pembagian tugas.
 - b. Dalam pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu diadakan evaluasi dalam bentuk pre test-post test.
 - c. Instansi perlu melakukan penilaian risiko kebakaran hutan dan mempertimbangkan penyediaan fasilitas penanggulangan kebakaran yang memadai.
 - d. Hasil tes kesamaptaan perlu ditindaklanjuti agar polisi kehutanan dapat meningkatkan

kondisi fisik dan kinerja polisi kehutanan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. *Luas Kawasan Hutan dan Perairan Tahun 2014*. 2014.
2. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/indonesia-dicatat-dalam-buku-r/> diakses pada tanggal 21 Februari 2016
3. Departemen Kehutanan. *Rencana Strategis Kehutanan 2006-2025*. 2005;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/MENHUT-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. 2009.
5. Syaufina L. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Bogor: Bayu Media; 2008.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. 2004.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/MENHUT-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. 2014.
8. J T. Karakteristik Masyarakat Tahan Bencana. DFID Disaster Risk Reduct Interag Coord Gr Whaley"s. 2007;
9. LIPI – UNESCO/ISDR. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami*. Jakarta: Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 2006.
10. Ryan L. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Pada Penghuni Mess PT. Sango Indonesia Semarang*. Fakultas Kesehatan Udinus; 2015.
11. Eko P. *Analisis Pengetahuan dan Sikap Karyawan terhadap Tanggap Darurat Bencana Kebakaran di RSUD Kota Semarang 2010*. 2010.
12. Fatmah. *Model Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat: Kajian Kualitatif pada Aparat Pemerintah dan LSM*. J Kesehatan Masyarakat Nasional. 2009;4(3).
13. Akbar A. *Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat sebagai Suatu Upaya Mengatasi Risiko dalam REDD*. Tekno Hutan Tanam 1. 2008;11(22).